

TRANSFORMASI PROFETIK HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN DALAM KONFLIK SOSIAL-EKOLOGIS

Musdodi Frans Jaswin Manalu

Center for Religious and Cross-cultural Studies, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Indonesia

Abstract: *This study aims to analyze the role of the Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) in responding to environmental conflicts and the dispossession of indigenous lands by PT Toba Pulp Lestari (TPL), and how the church's stance reflects a form of moral politics within the sociocultural context of the Batak people. Employing a descriptive-qualitative approach, this research utilizes content analysis of institutional documents, news reports, and relevant prior studies. Data interpretation draws on theoretical frameworks from Maslow, Giddens, Oliver, Fletcher, and the concept of institutional dissonance. The findings reveal a dynamic shift in HKBP's position, ranging from open resistance, pragmatic cooperation, to the revival of prophetic engagement. A significant factor affecting the effectiveness of the church's moral movement lies in the tension between central leadership and local congregations. The study concludes that HKBP's practice of moral politics represents a complex interplay of institutional structure, socio-economic pressures, and contextual ethical considerations. These findings contribute to the field of public theology and highlight the importance of participatory communication in maintaining moral consistency amid political and economic pressure.*

Korespondensi:

musdodimanalu56@gmail.com

Keywords: *Church Agency, HKBP, Local Church, Moral Politics, Toba Pulp Lestari*

Kata Kunci: *Agensi Gereja, Gereja Lokal, HKBP, Politik Moral, Toba Pulp Lestari*



This is an open-access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) dalam merespons konflik lingkungan dan perampasan tanah adat oleh PT Toba Pulp Lestari (TPL), serta bagaimana sikap gereja mencerminkan praktik politik moral dalam konteks sosial dan budaya Batak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan teknik analisis isi terhadap dokumen institusional, berita, dan kajian terdahulu yang relevan. Data dianalisis dengan pendekatan teoritis dari Maslow, Giddens, Oliver, Fletcher, dan konsep disonansi institusional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa HKBP mengalami dinamika sikap dari perlawanan terbuka, kooperasi pragmatis, hingga kebangkitan kembali suara profetik. Ketegangan antara pusat dan gereja lokal menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi efektivitas gerakan moral gereja. Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik politik moral HKBP mencerminkan interaksi kompleks antara struktur institusional, kebutuhan sosial-ekonomi, dan pertimbangan etis kontekstual. Temuan ini memberikan kontribusi pada kajian teologi publik dan menekankan pentingnya komunikasi partisipatif dalam menjaga konsistensi moral gereja di tengah tekanan kekuasaan dan ekonomi.

PENDAHULUAN

Tanggal 1 Maret 2025 menjadi momentum penting bagi sejumlah gereja anggota Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) yang mengadakan kebaktian yang bertajuk Kebaktian Kebangkitan Rakyat (KKR) di gereja HKBP Lumbanjulu di yang berada di wilayah operasional PT Toba Pulp Lestari (TPL). Dalam KKR tersebut, gereja-gereja tersebut untuk menyuarakan keprihatinan atas kerusakan lingkungan dan perampasan tanah adat di wilayah Tano Batak. Meskipun panitia penyelenggara mengimbau agar nama perusahaan tidak disebutkan secara eksplisit, suasana ibadah yang dihadiri oleh masyarakat adat dan para tokoh gereja memuncak dengan pekikan lantang "Tutup TPL!" sebagai bentuk ekspresi perlawanan

moral kolektif. Kehadiran HKBP yang diwakili langsung oleh Ephorus Pdt. Dr. Victor Tinambunan menjadi penanda keterlibatan institusional gereja dalam menyuarakan ketidakadilan struktural dan kerusakan ekologis yang disebabkan oleh PT Toba Pulp Lestari (TPL).

Berdasarkan berbagai sumber literatur, relasi antara HKBP dan TPL sesungguhnya telah berlangsung dalam jangka waktu yang panjang dan kompleks. Sejak berdiri pada tahun 1983 dengan nama PT Indorayon Inti Utama (IIU), perusahaan ini telah menimbulkan dampak ekologis yang serius seperti banjir bandang, longsor, dan degradasi tanah (Silaen, 2005). Pada masa itu, HKBP secara tegas menyuarakan perlawanan dan menuntut pertanggungjawaban perusahaan atas kerusakan lingkungan. Namun, sikap kritis tersebut mendapat tekanan dari negara melalui tindakan represif terhadap para pendeta yang terlibat dalam advokasi, yang dicap sebagai provokator (Manurung et al., 2022; Silaen, 2005).

Sebagai respons atas tekanan publik dan ketegangan yang meningkat, pada tahun 1998 IIU berganti nama menjadi PT Toba Pulp Lestari dan mengklaim akan mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku pohon. Selama beberapa waktu, perubahan ini tampak meredakan konflik, dan HKBP pun menurunkan intensitas perlawanannya. Namun, situasi ini dimanfaatkan oleh TPL dengan cara merekrut masyarakat lokal sebagai pekerja perusahaan serta memberikan bantuan material kepada gereja-gereja di sekitarnya. Bantuan ini diterima oleh sebagian pihak sebagai bentuk pertobatan, namun di sisi lain juga menimbulkan ketergantungan dan membatasi ruang kritis gereja (Manalu, 2023).

Ketergantungan ini menyebabkan pergeseran sikap. Sejak tahun 2005, perlawanannya terhadap TPL perlahan surut dan relasi antara gereja dan perusahaan menjadi semakin pragmatis. Keadaan ini berlangsung hingga dua dekade kemudian, saat pimpinan baru HKBP kembali menggugah perlawanan setelah melihat langsung kondisi di Desa Nagasaribu, di mana akses jalan masyarakat dibatasi oleh palang besi perusahaan, dan tanah adat dirampas melalui intimidasi maupun iming-iming kompensasi (Manalu, 2025; Pardosi, 2025).

Situasi inilah yang melatarbelakangi penyelenggaraan ibadah bersama dan jumpa pers pada 1 Maret 2025 di HKBP Lumbanjulu sebagai bentuk sikap profetik gereja. Di tengah suasana emosional dan dorongan memori kolektif masyarakat, peristiwa tersebut menjadi penanda kebangkitan kembali suara kenabian HKBP di tengah krisis ekologis dan ketidakadilan struktural.

Perubahan sikap HKBP—dari konfrontatif, lalu kooperatif, dan kini kembali kritis—menunjukkan bahwa gereja telah memasuki ranah politik moral. Melalui pemaparan singkat tentang dinamika relasi antara HKBP dan TPL, penelitian ini hendak menjawab tiga pertanyaan reflektif: (1) Apakah gereja memiliki legitimasi untuk menjalankan politik moral? (2) Sejauh mana politik moral tersebut berdampak bagi kepentingan umum? (3) Bagaimana HKBP pusat seharusnya menyikapi gereja-gereja lokal yang pernah menjalin hubungan pragmatis dengan TPL? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi pintu masuk untuk meninjau kembali posisi profetik HKBP dalam menghadapi krisis lingkungan dan relasi kuasa di Tano Batak.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah menyoroti keterlibatan HKBP dalam konflik dengan TPL. Silaen (2005) membahas dampak ekologis dan sosial dari PT Indorayon, serta respons gereja terhadapnya. Sementara itu, Manurung et al. (2022) dan Manalu (2023, 2025) mengkaji dinamika perubahan posisi HKBP melalui perspektif hubungan kekuasaan dan politik lokal. Namun, studi-studi tersebut belum secara eksplisit membahas transformasi etis dan strategi profetik gereja dalam konteks ketidakharmonisan antara HKBP pusat dan gereja-gereja lokal. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut, dengan menyoroti HKBP sebagai institusi keagamaan yang bergulat dengan politik moral dalam konteks konflik lingkungan dan ketidakadilan struktural di Tanah Batak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi pustaka. Pendekatan ini dipilih untuk menelusuri dinamika hubungan antara Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) dan perusahaan Toba Pulp Lestari (TPL) melalui penelusuran terhadap sumber-sumber literatur relevan.

Sumber data terdiri atas buku ilmiah, artikel jurnal, laporan investigatif, berita daring, dan dokumen historis terkait HKBP dan TPL, yang dipublikasikan dalam kurun waktu dua dekade terakhir. Kriteria pemilihan literatur didasarkan pada relevansi dengan isu gereja, politik moral, dan konflik agraria, serta kredibilitas penerbitnya. Proses pencarian dilakukan melalui database akademik dan arsip digital terpercaya.

Data dianalisis menggunakan pendekatan tematik, dengan mengelompokkan informasi berdasarkan tema seperti perubahan sikap institusional HKBP, politik moral gereja, serta respon terhadap krisis lingkungan. Analisis dilakukan secara kritis dan interpretatif untuk mengevaluasi pergeseran strategi dan narasi HKBP dalam konteks konflik dengan TPL

HASIL PENELITIAN

Penelitian ini menemukan bahwa gerakan profetik HKBP terhadap Toba Pulp Lestari (TPL), yang diwujudkan melalui Kebaktian Kebangkitan Rakyat (KKR) pada 1 Maret 2025 di HKBP Lumbanjulu, belum memberikan dampak maksimal dalam membangun solidaritas lintas jemaat. Pelaksanaan kegiatan ini menimbulkan respon beragam di kalangan masyarakat, termasuk munculnya kegiatan ibadah tandingan yang diselenggarakan oleh sebagian jemaat HKBP di sekitar wilayah operasional TPL.

Selain itu, kegiatan KKR dilaksanakan tanpa sosialisasi yang luas, sehingga menimbulkan kesan eksklusif dan menyebabkan kebingungan di kalangan masyarakat sekitar. Beberapa tanggapan dari media sosial seperti Facebook dan TikTok mencerminkan ketidakharmonisan pendapat publik mengenai sikap HKBP terhadap TPL. Beberapa masyarakat memberikan dukungan, sementara yang lain melontarkan kritik terhadap langkah tersebut.

Temuan ini mengindikasikan adanya jarak komunikasi antara pimpinan pusat HKBP dan jemaat yang berada di sekitar TPL, serta lemahnya koordinasi dalam membangun gerakan

yang inklusif. Keterbatasan ini menjadi faktor utama yang menghambat optimalisasi dampak dari suara kenabian yang ingin dibangun melalui gerakan ini.

PEMBAHASAN

Politik Moral sebagai Ruang Gerak Gereja

Keterlibatan HKBP dalam merespons kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh Toba Pulp Lestari (TPL) menempatkan institusi keagamaan ini dalam ranah politik moral. Gereja tidak semata-mata bertindak sebagai institusi ibadah, melainkan juga sebagai pembela keadilan sosial. Hal ini sejalan dengan pandangan Naselli, yang menyebut bahwa teologi politik memberikan dasar bagi komunitas keagamaan untuk berpartisipasi aktif dalam ruang publik berdasarkan prinsip iman dan tanggung jawab sosial. Menurut Naselli, teologi politik tidak hanya berbicara tentang hubungan antara agama dan negara dalam konteks kelembagaan, tetapi juga tentang bagaimana prinsip-prinsip iman seperti keadilan, belas kasih, dan kebenaran diwujudkan dalam kehidupan sosial dan politik. Ia menekankan bahwa gereja memiliki peran sebagai suara profetik yang menentang ketidakadilan, serta sebagai agen moral yang menawarkan arah etis bagi peradaban publik (Naselli, 2024).

Dalam praktik global, berbagai gereja di dunia telah menunjukkan peran serupa, seperti Gereja Katolik yang secara eksplisit mendukung partisipasi politik demi keadilan. Hal ini tercermin dalam berbagai dokumen ajaran sosial Gereja, termasuk seruan Paus Fransiskus dalam *Evangelii Gaudium* dan *Laudato Si'*, yang mendorong keterlibatan aktif umat Katolik dalam perjuangan melawan ketimpangan sosial dan krisis lingkungan. Gereja Katolik memandang keterlibatan politik sebagai bagian dari panggilan moral untuk memperjuangkan martabat manusia dan kebaikan bersama (Luciani, 2018).

Sementara itu, Dewan Gereja Zambia (CCZ) mengaitkan advokasi lingkungan dengan nilai-nilai iman dan tanggung jawab keagamaan terhadap penciptaan. CCZ memandang degradasi lingkungan sebagai bentuk ketidakadilan struktural yang harus dilawan melalui pendidikan moral, pengorganisasian komunitas, dan keterlibatan dalam kebijakan publik. Mereka menggunakan pendekatan teologis untuk membangun kesadaran ekoteologis di kalangan umat dan mendorong aksi kolektif berbasis iman demi keadilan ekologis (Sakupapa, 2023).

Seperti yang ditegaskan oleh Colomer (2005), sistem politik cenderung mendukung pihak dominan, karena kebijakan publik sering kali dirancang untuk melindungi kepentingan elite yang memiliki akses terhadap kekuasaan, media, dan sumber daya. Dalam kerangka ini, masyarakat sipil dan institusi keagamaan yang mencoba menyuarakan keadilan kerap dianggap sebagai gangguan terhadap stabilitas yang dijaga oleh elite tersebut. Dalam konteks ini, HKBP mencoba menghadirkan suara tandingan terhadap hegemoni TPL sebagai bentuk pembelaan terhadap komunitas akar rumput yang terdampak langsung oleh eksploitasi lingkungan dan ketimpangan kekuasaan.

Politik moral yang dijalankan HKBP tidak semestinya dipahami sebagai upaya meraih kekuasaan, melainkan sebagai wujud aksi profetik yang membela hak masyarakat dan

lingkungan hidup. Ini merupakan pengejawantahan dari mandat teologis gereja untuk merawat ciptaan Tuhan (Konfesi HKBP 1996 pasal 5). Oleh karena itu, peran HKBP dalam lanskap sosial-politik tidak dapat dilepaskan dari dimensi teologis dan etis yang mengakar dalam iman Kristen itu sendiri.

Dinamika Relasi HKBP Pusat dan Jemaat Sekitar TPL

Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan komunikasi dan koordinasi antara HKBP pusat dan gereja-gereja lokal di sekitar wilayah operasional TPL. Ketika HKBP pusat mengambil sikap tegas melalui gerakan Kebaktian Kebangkitan Rakyat (KKR), muncul ibadah tandingan sebagai bentuk ketidakterlibatan gereja lokal. Ini menunjukkan adanya jarak antara kebijakan pusat dan realitas di lapangan. Beberapa gereja lokal cenderung beradaptasi dengan kehadiran TPL karena faktor sosial-ekonomi.

Robbins dan Judge (2009) menekankan bahwa dalam konteks organisasi, komunikasi vertikal yang lemah atau tidak partisipatif dapat menimbulkan resistensi struktural, khususnya ketika otoritas pusat tidak memahami konteks lokal secara menyeluruh. Mereka menyoroti bahwa organisasi yang mengandalkan pendekatan top-down tanpa membuka ruang partisipasi bagi unit-unit lokal berisiko menimbulkan ketegangan internal. Ketika suara dan pengalaman dari lapisan bawah tidak diperhitungkan dalam proses pengambilan keputusan, hal itu dapat melahirkan rasa keterasingan, penolakan terhadap kebijakan, bahkan konflik internal yang menghambat efektivitas organisasi secara keseluruhan.

Maslow (2023) dalam teorinya tentang hierarki kebutuhan menyatakan bahwa kebutuhan dasar seperti rasa aman dan kenyamanan sosial dapat memengaruhi perilaku individu maupun institusi. Teori ini menyusun kebutuhan manusia dalam lima tingkatan hierarkis: kebutuhan fisiologis, keamanan, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Menurut Maslow, individu atau kelompok cenderung memprioritaskan pemenuhan kebutuhan di tingkat bawah sebelum dapat memperjuangkan nilai atau tujuan ideal di tingkat yang lebih tinggi.

Dalam hal ini, gereja lokal yang menerima bantuan dari TPL merasa eksistensinya terjamin karena kebutuhan ekonomi dan stabilitas komunitas telah terpenuhi, sehingga cenderung mempertahankan relasi tersebut. Gereja tidak berada dalam posisi ideal untuk mengedepankan perlawanan atau sikap profetik karena sedang berada dalam fase mempertahankan kebutuhan dasar. Namun demikian, kondisi ini tidak hanya dapat dilihat dari sisi kebutuhan, tetapi juga dari dinamika struktur dan agensi yang saling memengaruhi.

Dalam perspektif strukturasi Giddens (2011), kesenjangan antara pusat dan gereja lokal merupakan hasil dari relasi timbal balik antara struktur dan agensi. Giddens menjelaskan bahwa struktur sosial tidak hanya membatasi tindakan individu atau institusi, tetapi juga memberikan kerangka yang memungkinkan tindakan itu sendiri. Struktur terdiri dari aturan dan sumber daya yang secara berulang digunakan oleh aktor sosial dalam praktik kehidupan sehari-hari. Sementara itu, agensi adalah kapasitas individu atau kelompok untuk bertindak secara sadar dan reflektif dalam menghadapi situasi sosial tertentu.

Struktur pusat HKBP menetapkan norma dan kebijakan sebagai pedoman kelembagaan, tetapi gereja lokal sebagai agen memiliki daya untuk bertindak, menafsirkan, dan menyesuaikan kebijakan tersebut terhadap realitas sosial dan ekonomi yang mereka hadapi. Keputusan untuk berelasi dengan TPL bukan sekadar bentuk ketaatan atau pembangkangan, tetapi hasil dari interaksi kompleks antara tekanan lokal, kebutuhan komunitas, dan pemaknaan ulang terhadap nilai-nilai organisasi.

Lebih jauh, ketidaksesuaian antara nilai yang dianut pusat dengan praktik gereja lokal mencerminkan fenomena disonansi institusional. Disonansi muncul ketika terdapat ketidaksesuaian antara keyakinan dan tindakan yang dijalankan oleh individu atau institusi, yang kemudian menimbulkan ketegangan psikologis atau struktural. Menurut Harmon-Jones & Harmon-Jones, disonansi tidak hanya bersifat individual tetapi juga dapat terjadi secara kolektif dalam organisasi, terutama ketika ekspektasi normatif dari pusat tidak sejalan dengan praktik lapangan (Harmon-Jones & Harmon-Jones, 2012).

Ketika nilai pusat berbenturan dengan tekanan eksternal yang diterima oleh unit lokal, seperti bantuan dari TPL, maka organisasi akan mengalami ketegangan antara apa yang dikatakan, diputuskan, dan dilakukan. Dalam konteks HKBP, ketegangan ini terlihat dalam bentuk perbedaan aksi antara pusat dan lokal, serta potensi konflik internal yang dapat melemahkan kohesi organisasi. Jika tidak ditangani secara reflektif dan sistemik, disonansi ini dapat memicu fragmentasi nilai dan kehilangan arah strategis dalam tubuh institusi.

Dengan demikian, dinamika relasi antara HKBP pusat dan gereja-gereja lokal di sekitar wilayah TPL menunjukkan bahwa persoalan koordinasi bukan semata-mata masalah teknis, melainkan juga menyangkut dimensi psikososial, struktural, dan teologis yang kompleks. Ketimpangan komunikasi, tekanan kebutuhan dasar, dan ketidaksesuaian antara nilai pusat dan realitas lokal menciptakan ruang disonansi yang berpotensi menggerus kohesi internal lembaga gereja.

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih dialogis, reflektif, dan kontekstual dalam membangun relasi antara pusat dan lokal—yakni pendekatan yang mampu menjembatani struktur dan agensi, serta membuka ruang bagi rekonsiliasi nilai dan tindakan. Dalam konteks ini, HKBP perlu memosisikan gereja lokal bukan sebagai objek kebijakan, melainkan sebagai mitra sejajar dalam perjuangan profetik demi keadilan sosial dan kelestarian lingkungan.

Peranan Gereja Lokal: Dukungan atau Penyesuaian?

Dalam perspektif kebutuhan hierarkis Maslow (2023), sikap gereja lokal terhadap TPL dapat dijelaskan sebagai bentuk penyesuaian untuk memenuhi kebutuhan dasar jemaat. Kebutuhan fisiologis dan keamanan tampaknya telah lebih dulu dipenuhi oleh perusahaan dibandingkan oleh gereja pusat. Hal ini menimbulkan dilema moral: antara mempertahankan integritas teologis atau memastikan keberlangsungan jemaat secara praktis.

Lebih jauh, respons gereja lokal dapat dianalisis menggunakan teori adaptasi institusional dari Oliver (1991), yang mengemukakan bahwa unit organisasi kerap memilih

strategi *acquiescence* atau penyesuaian terhadap tekanan eksternal sebagai bentuk kompromi strategis. Oliver mengidentifikasi lima tipe respons institusional terhadap tekanan lingkungan: *acquiescence* (penerimaan), *compromise* (kompromi), *avoidance* (penghindaran), *defiance* (penolakan), dan *manipulation* (manipulasi). Strategi-strategi ini dipilih berdasarkan sejauh mana organisasi menilai kebutuhan untuk mempertahankan legitimasi sambil tetap mengelola otonomi internal. Dalam konteks ini, gereja lokal menyesuaikan diri terhadap kehadiran TPL demi menjaga stabilitas pelayanan dan relasi sosial komunitas mereka. Penyesuaian ini mencerminkan strategi bertahan dalam situasi di mana tekanan dari lingkungan sekitar dianggap lebih mendesak dibanding kepatuhan langsung terhadap nilai pusat.

Dalam konteks etika praktis, pendekatan etika situasional yang diajukan oleh Fletcher (1966) juga dapat digunakan untuk memahami dilema gereja lokal. Fletcher menolak pendekatan etika yang kaku dan legalistik, dan mengusulkan bahwa dalam setiap situasi moral, keputusan yang benar adalah keputusan yang paling mencerminkan kasih (*agape*). Ia menekankan bahwa kasih harus menjadi satu-satunya hukum moral yang absolut, sedangkan aturan lainnya bersifat relatif terhadap konteks. Dalam logika ini, tindakan yang secara normatif dianggap menyimpang dapat dibenarkan secara etis jika motivasi utamanya adalah kasih dan perlindungan terhadap kehidupan manusia. Gereja lokal mungkin melihat relasi dengan TPL sebagai pilihan etis terbaik dalam situasi yang serba terbatas—bukan karena mengabaikan prinsip, tetapi karena ingin menjaga kesejahteraan jemaat yang bergantung pada stabilitas ekonomi dan sosial yang diberikan oleh perusahaan.

Dengan demikian, sikap gereja lokal terhadap TPL tidak dapat serta-merta dimaknai sebagai bentuk penyelewengan nilai atau pembangkangan terhadap otoritas pusat, melainkan sebagai respons kompleks terhadap tekanan kebutuhan, struktur organisasi, dan pertimbangan etis kontekstual. Melalui kerangka Maslow, Oliver, dan Fletcher, terlihat bahwa pilihan mereka untuk menjalin relasi dengan TPL merupakan upaya adaptif dalam menghadapi realitas sosial-ekonomi yang mendesak. Penyesuaian ini mencerminkan pergulatan moral antara mempertahankan kesetiaan pada nilai institusional dan memenuhi kebutuhan konkret jemaat di tengah tekanan eksternal. Karena itu, pendekatan gereja pusat terhadap gereja lokal harus dilandasi oleh pemahaman yang empatik, dialogis, dan mendalam terhadap konteks yang melingkupi keputusan-keputusan lokal tersebut.

Pelajaran dari Tokoh-Tokoh Agama Dunia

Martin Luther King Jr., Mahatma Gandhi, dan Uskup Oscar Romero adalah contoh tokoh agama yang menjalankan politik moral dengan pendekatan inklusif. Mereka tidak hanya melawan ketidakadilan, tetapi juga membangun jembatan solidaritas dengan semua golongan. King, misalnya, memulai gerakannya dari isu hak-hak sipil untuk warga kulit hitam di Amerika Serikat, memperjuangkan kesetaraan hukum, penghapusan diskriminasi rasial, dan akses yang adil terhadap pendidikan serta layanan publik. Namun, seiring waktu, visinya berkembang menjadi lebih inklusif. Ia menyadari bahwa ketidakadilan rasial tidak bisa

dipisahkan dari ketidakadilan ekonomi. Karena itu, pada tahun-tahun terakhir hidupnya, King memperluas perjuangannya ke ranah ekonomi melalui *Poor People's Campaign* yang merangkul semua orang miskin tanpa melihat ras, agama, atau latar belakang etnis (Ginting et al., 2024). Ia menegaskan bahwa kemiskinan adalah bentuk ketidakadilan struktural yang harus dilawan bersama-sama oleh semua kelompok yang tertindas.

Gandhi juga menjalankan perjuangan yang menjangkau semua kasta dan agama. Ia menolak kekerasan sebagai strategi politik dan memegang teguh prinsip Ahimsa (non-kekerasan) sebagai bentuk perjuangan yang bermartabat. Dalam upaya untuk menghapuskan diskriminasi terhadap komunitas Dalit, ia menyebut mereka sebagai Harijan (anak-anak Tuhan), menunjukkan keberpihakan moral yang radikal terhadap kelompok yang paling terpinggirkan dalam struktur sosial India (Krishnan, 2011).

Oscar Romero sendiri mengalami transformasi dari sosok konservatif menjadi pembela kaum tertindas setelah menyaksikan langsung ketidakadilan di El Salvador. Ia mengkritik kekerasan dari kedua sisi konflik dan menyuarakan perlindungan terhadap rakyat sipil dan para pastor yang ditekan. Dalam banyak khotbahnya, Romero menyerukan penghentian penindasan terhadap orang miskin, mengancam pelanggaran hak asasi manusia oleh rezim militer, dan menuntut keadilan sosial bagi masyarakat kecil. Keberaniannya dalam berbicara terbuka membuatnya menjadi simbol perlawanan moral, meskipun akhirnya ia dibunuh saat memimpin misa pada tahun 1980 (Gruber et al., 2024).

Ketiganya menunjukkan bahwa suara kenabian yang efektif bukan berasal dari gebrakan semata, tetapi dari strategi yang melibatkan, mendengarkan, dan merangkul semua pihak, termasuk mereka yang dianggap telah menyimpang. Ini menjadi cermin bagi HKBP, bahwa dalam menghadapi gereja-gereja lokal yang dianggap “bermasalah”, pendekatan terbaik bukanlah vonis atau seruan tiba-tiba untuk bertobat, tetapi pendampingan yang konsisten, sabar, dan berlandaskan kasih. Hanya dengan cara itu, visi profetik HKBP untuk membela lingkungan dan masyarakat adat bisa terwujud secara menyeluruh.

Implikasi dan Rekomendasi

Penelitian ini menggarisbawahi bahwa keberhasilan gerakan moral HKBP sangat dipengaruhi oleh pendekatan strategis yang inklusif dan dialogis. Komunikasi yang baik antara HKBP pusat dan gereja lokal menjadi kunci dalam membangun gerakan yang utuh dan berkelanjutan. Selain itu, penting bagi HKBP untuk memahami motif, konteks sosial, dan pergumulan jemaat lokal, bukan sekadar sebagai penerima kebijakan, tetapi sebagai mitra dalam perjuangan moral.

HKBP juga perlu memperkuat kapasitas internalnya dalam membangun solidaritas lintas aras gereja, termasuk dengan jemaat yang secara geografis dekat dengan pusat konflik. Strategi yang digunakan harus mengedepankan edukasi, pendekatan pastoral, dan pelibatan aktif komunitas dalam setiap tahap gerakan. Dengan demikian, resistensi atau salah paham dapat diminimalisasi, dan partisipasi kolektif dapat dimaksimalkan.

Lebih jauh, HKBP perlu membangun mekanisme internal untuk menangani disonansi nilai antara pusat dan lokal secara preventif dan reflektif, bukan reaktif. Ini mencakup penguatan struktur komunikasi dua arah, pelatihan kepemimpinan transformatif, serta ruang dialog teologis yang terbuka dan setara.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan HKBP dalam merespons kerusakan lingkungan dan perampasan tanah adat oleh Toba Pulp Lestari (TPL) merupakan bagian dari praktik politik moral yang dijalankan oleh institusi keagamaan dalam konteks lokal. Melalui analisis terhadap dinamika relasi antara HKBP pusat dan gereja-gereja lokal di sekitar wilayah operasional TPL, ditemukan adanya ketegangan antara nilai-nilai normatif institusi pusat dan realitas pragmatis yang dihadapi oleh gereja lokal. Ketegangan ini tidak hanya mencerminkan disonansi struktural, tetapi juga membuka ruang refleksi atas posisi gereja sebagai agen moral dalam struktur sosial yang kompleks.

Kontribusi utama dari penelitian ini terletak pada pemahaman baru bahwa pergeseran sikap HKBP—dari perlawanan, menuju kompromi, dan kembali pada sikap profetik—merupakan cerminan dinamika teologis, sosial, dan politik yang tidak dapat dipisahkan dari konteks budaya Batak. Temuan ini memperkaya kajian tentang teologi publik dan politik moral dalam tradisi kekristenan lokal, serta menawarkan kerangka untuk membaca ulang peran gereja bukan hanya sebagai institusi spiritual, tetapi juga sebagai aktor sosial-politik yang aktif dalam memperjuangkan keadilan ekologis dan hak masyarakat adat.

Secara praktis, penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan yang dialogis dan partisipatif dalam membangun komunikasi antara HKBP pusat dan gereja-gereja lokal. Model komunikasi vertikal yang top-down terbukti kurang efektif dalam merespons kompleksitas di tingkat akar rumput. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi kepemimpinan yang transformatif dan berbasis kontekstual, yang mampu menjembatani struktur dan agensi dalam tubuh gereja.

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam ruang lingkup data primer dan belum menggali secara menyeluruh perspektif masyarakat adat serta suara dari jemaat lokal yang terlibat langsung dalam relasi dengan TPL. Untuk itu, penelitian lanjutan disarankan untuk melakukan studi lapangan yang lebih mendalam, mengeksplorasi peran gereja lokal sebagai subjek aktif dalam dinamika resistensi dan negosiasi kekuasaan. Selain itu, perlu dilakukan kajian perbandingan antar-denominasi Kristen di Indonesia dalam merespons isu lingkungan sebagai kontribusi terhadap pengembangan teologi ekologi kontekstual.

DAFTAR PUSTAKA

Colomer, J. M. (2005). It's parties that choose electoral systems (or, Duverger's Laws upside down). *Political Studies*, 53(1). <https://doi.org/10.1111/j.1467-9248.2005.00514.x>

Giddens, A. (2011). *The Constitution of Society: Teori Strukturasi untuk Analisis Sosial*. Pedati.

- Ginting, Y., Susento, J., Akbar, M., Haditama, T., & Stefana, V. (2024). Sosialisasi Klinis Hukum tentang Peran Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan melalui Rumah Restorative Justice. *Jurnal Pengabdian West Science*, 3, 543–556. <https://doi.org/10.58812/jpws.v3i05.1131>
- Gruber, J., Van Mulder, J., Christiaens, K., Draulans, V., Haers, J., Janssens, J., & Parmentier, S. (Ed.). (2024). *The Romero Memory*. Leuven University Press. <https://doi.org/10.11116/9789461665621>
- Harmon-Jones, E., & Harmon-Jones, C. (2012). Cognitive dissonance theory. *Handbook of motivation science*, 71.
- Krishnan, P. S. (2011). Synthesising the Gandhi–Ambedkar–Narayanaguru–Marx Visions for Dalit Liberation*. *Social Change*, 41(1), 1–39. <https://doi.org/10.1177/004908571104100101>
- Luciani, R. (2018). Pope Francis and the theology of the people. In *The Routledge Handbook of Postsecularity* (hal. 11). <https://doi.org/10.4324/9781315307831-17>
- Manalu, M. F. J. (2023). Grounding Church Initiative: Church’s Initiative To Develop Environmental Awareness. *Journal of Asian Orientation in Theology*, 5(2), 201–222. <https://doi.org/10.24071/jaot.v5i2.6660>
- Manalu, M. F. J. (2025). Criminalization and Land Rights Conflict: The Indigenous Struggle Against PT Toba Pulp Lestari. *Indigenous Southeast Asian and Ethnic Studies*, 1(1), 35–53. <https://doi.org/10.32678/iseaes.v1i1.5>
- Manurung, A. H., Manurung, A., Manurung, H., & Manurung, J. S. (2022). *Sejahterahkan Masyarakat Toba: PT Toba Pulp Lestari Tbk Mau Ke Mana?* PT. Adler Manurung Press.
- Maslow, A. H. (2023). *Motivation And Personality: Unlocking Your Inner Drive and Understanding Human Behavior*. Prabhat Prakashan.
- Naselli, A. D. (2024). What Is the Spectrum of Major Views on Political Theology? A Proposed Taxonomy of Seven Views on Religion and Government. *The Southern Baptist Journal of Theology*, 28(2), 168–190.
- Pardosi, M. (2025). *Ephorus HKBP Teteskan Air Mata saat Berada di Portal PT TPL di Kawasan Nagasaribu*. TribunMedan.com. <https://medan.tribunnews.com/2025/02/17/ephorus-hkbp-teteskan-air-mata-saat-berada-di-portal-pt-tpl-di-kawasan-nagasaribu>
- Robbins, S. P., & Judge, T. (2009). *Organizational behavior*. Pearson South Africa.
- Sakupapa, T. C. (2023). Zambian Protestant Ecumenism and the Quest for Eco-Justice: A Case Study of the Council of Churches in Zambia. *Scriptura*, 122(1). <https://doi.org/10.7833/122-1-2137>
- Silaen, V. (2005). Perjuangan Hak-hak Sipil dalam Konteks Politik Lokal. *Sociae Polites*, 2(September), 19–23. <https://doi.org/10.33541/sp.v5i23.511>